bank nusamba
bpr nusamba cepiring

LAPORAN TAHUNAN

Tahun 2024



Cek Lur!!
Contact me on WhatsApp
08112766651
bpr nusamba cepiring
nusambacepiring.com

BPR Nusamba Cepiring merupakan peserta penjaminan LPS
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
AYO ke BANK
BPR Nusamba Cepiring Berizin dan Diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
BPR
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LEMBAR PERSETUJUAN

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _No.23 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Transparansi Kondisi Keuangan BPR & BPER serta SEOJK 16/ SEOJK.03 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Transparansi Kondisi keuangan BPR terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan Tahunan dan Transparansi Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap kinerja dan transparansi Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup sebagaimana sesuai dengan Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _No.23 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Transparansi Kondisi Keuangan BPR & BPER serta SEOJK 16/ SEOJK.03 Tahun 2024 Tentang Pelaporan dan Transparansi Kondisi keuangan BPR selama tahun 2024 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang Transaparansi Kondisi Keuangan dan Penerapan tata Kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 05 Mei 2025

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

bank nusamba bpr nusamba cepiring

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i
LEMBAR PERSETUJUAN …… ii
DAFTAR ISI…..... iii

BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Dasar hukum.. …… 1
B. Informasi Perusahaan.....1

BAB II KEPENGURUSAN……..... 2
A. Data Direksi dan Dewan Komisaris 2
B. Data Pejabat Eksekutif…….. ……. 6

BAB III KEPEMILIKAN……. ……. 9
A. Kepemilikan…… ……. 9

BAB IV PERKEMBANGAN USAHA BPR …… 10
A. Riwayat Pendirian BPR …… 10
B. Ikhtisar Data Keuangan Penting…… …… 10
C. Kualitas Aset Produktif & Rasio Keuangan…… 11
D. Rasio NPL & Penyebab Utamanya…… 12
E. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Signifikan dan Perubahan Penting Lainya 12

BAB V STRATEGI & KEBIJAKAN MANAJEMEN……..... 13
A. Manajemen Umum..... 13
B. Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Risiko BPR …… 15

BAB VI LAPORAN MANAJEMEN …… 21
A. Sruktur Organisasi.. …… 21
B. Bidang Usaha……21
C. Tekhnologi Informasi…… 22
D. Perkembangan & Target Pasar…… 22
E. Jumlah, Jenis & Lokasi Alamat Kantor…… 23
F. Kerja sama & Mitra Usaha Dalam Rangka Pengembangan Usaha…… 25

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA…..... 26
A. Bidang Tugas & Komposisi Karyawan 26
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia & Kegiatan Pengembangan 26

BAB VIII LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ……..……..... 30

A. Laporan Posisi Keuangan 30

B. Laporan Laba Rugi…….. 32

C. Laporan Komitmen & Kontinjensi…… 33

D. Laporan Perubahan Ekuitas…… 33

E. Laporan Arus Kas …… 34

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

TRANSPARANSI TATA KELOLA

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dengan Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Serta SEOJK 16 / SEOJK.03 /2024 Tentang Pelaporan dan TKK BPR dimana BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Sejalan dengan mandatory POJK No 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perkonomian Rakyat sesuai pasal 147 dimana BPR Wajib melakukan perubahan nomenklatur " Bank Perkreditan Rakyat" Menjadi " Bank Perekonomian Rakyat.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120109731925 Tanggal 12 Juli 2019.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.
5. Keputusan Mentri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU 0000055.AH.01.02. Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring.

BAB II
KEPENGURUSAN

A. DATA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

DATA DEWAN KOMISARIS	
	
Nama	DWIYONO, SE, MM
Alamat	Graha Mandiri Residence Blok No7 4/7 Patemon Gunungpati
Jabatan	Komisaris Utama
Tanggal Mulai Menjabat	14 Maret 2022
Tanggal Selesai Menjabat	14 Maret 2025
Nomor SK Persetujuan Otoritas	1
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	24 Mei 2022
Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 Mei 2026
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	24 Januari 2007
Nama Lembaga Pendidikan	STIE Stikubank Semarang

DATA DEWAN KOMISARIS



Nama	JOKO SUYANTO, SE, MM
Alamat	Jl. Kemang Cempaka Blok Bg11 3/12 Bojong Menteng Rawalumbu
Jabatan	Komisaris
Tanggal Mulai Menjabat	14 Maret 2022
Tanggal Selesai Menjabat	14 Maret 2025
Nomor SK Persetujuan Otoritas	2
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	24 Mei 2022
Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	22 Oktober 2027
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	25 September 2004
Nama Lembaga Pendidikan	STIE Stikubank Semarang

DATA DIREKSI



Nama	BAMBANG SUSANTO, SE, MM
Alamat	Griya Kendal Asri I 1/1 Langenharjo Kendal
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal Mulai Menjabat	14 Maret 2022
Tanggal Selesai Menjabat	14 Maret 2025
Nomor SK Persetujuan Otoritas	3
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	24 Mei 2022
Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	27 April 2028
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	15 September 2003
Nama Lembaga Pendidikan	STIE Stikubank Semarang

DATA DIREKSI



Nama	FITRIANINGSIH, SE
Alamat	Gg. Mangis 14/3 Kebondalem Kendal
Jabatan	Direktur
Tanggal Mulai Menjabat	14 Maret 2022
Tanggal Selesai Menjabat	14 Maret 2025
Nomor SK Persetujuan Otoritas	4
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	24 Mei 2022
Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	27 April 2028
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	22 Maret 2013
Nama Lembaga Pendidikan	Universitas Sultan Agung (UNISULA)

B. DATA PEJABAT EKSEKUTIF

DATA PEJABAT EKSEKUTIF

Nama	ANDIN SYAMSUL RIZAL, S.T
Alamat	Aromasari Rt 009 Rw 001 Sukorejo Kendal
Jabatan	Kepala Kantor Pusat Operasional
Tanggal Mulai Menjabat	26 September 2023
Nomor Surat Pengangkatan	054/NSB-CPR/SK-SDM/IX/2023
Tanggal Pengangkatan	26 September 2023

Nama	DEDY ARTHORI ,SE
Alamat	Jl. Meranti Barat Dalam I/63 Rt 003 Rw 015 Srondol Wetan Banyumanik Semarang
Jabatan	Kepala Kantor Cabang
Tanggal Mulai Menjabat	15 Agustus 2022
Nomor Surat Pengangkatan	018/NSB-CPR/SK-SDM/VIII/2022
Tanggal Pengangkatan	15 Agustus 2022

Nama	SRI KUSUMAWATI ,SE
Alamat	Jl Sugriwo VI A 9A Rt 006 Rw 003 Krapyak Semarang Barat Semarang
Jabatan	Kepala Kantor Cabang
Tanggal Mulai Menjabat	12 Oktober 2020
Nomor Surat Pengangkatan	063/NSB-CPR/SK-SDM/X/2020
Tanggal Pengangkatan	07 Oktober 2020

Nama	ARIEF ALIFUDIN, SE
Alamat	Perum Manggisan Baru Rt 005 Rw 004 Langenharjo Kendal
Jabatan	Kepala Kantor Cabang
Tanggal Mulai Menjabat	12 Oktober 2020

Nomor Surat Pengangkatan	063/NSB-CPR/SK-SDM/X/2020
Tanggal Pengangkatan	07 Oktober 2020

Nama	DWI HARYONO, SE
Alamat	Wringinputih 01/01 Bergas Kabupaten Semarang
Jabatan	Kepala Kantor Cabang
Tanggal Mulai Menjabat	12 Oktober 2022
Nomor Surat Pengangkatan	025/NSB-CPR/SK-SDM/X/2022
Tanggal Pengangkatan	12 Oktober 2022

Nama	ACHMAD ABDUL MAJID KHOIRUDIN, S.Pd.I.
Alamat	Gading 2/4 Kedunggading Ringinarum Kendal
Jabatan	Kepala Kantor Cabang
Tanggal Mulai Menjabat	22 April 2024
Nomor Surat Pengangkatan	015/NSB-CPR/SK-SDM/IV/2024
Tanggal Pengangkatan	22 April 2024

Nama	MIFTAHUL IMAM, S. SOS
Alamat	Cepiring Rt 002 Rw 002 Cepiring Kendal
Jabatan	Kepala Bidang Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT
Tanggal Mulai Menjabat	08 Maret 2018
Nomor Surat Pengangkatan	004/NSB-CPR/SK-SDM/VII/2018
Tanggal Pengangkatan	08 Maret 2018

Nama	ISNU TAUFIQ, SHI
Alamat	Krajan 4/2 Panunggalan Pulokulon Grobogan
Jabatan	Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Internal
Tanggal Mulai Menjabat	12 Oktober 2020
Nomor Surat Pengangkatan	062/NSB-CPR/SK-SDM/X/2020
Tanggal Pengangkatan	07 Oktober 2020

Nama	MARIAH IZZAH
Alamat	Jl. Panda Raya No. 77 Palebon Pedurungan Semarang
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal Mulai Menjabat	15 Juli 2024
Nomor Surat Pengangkatan	002/NSB-CPR/SK-SDM/I/2020
Tanggal Pengangkatan	06 Januari 2020

BAB III
KEPEMILIKAN

A. KEPEMILIKAN

- **Susunan kepemilikan terakhir**

⇨ Pada Tahun 2024 untuk Struktur Permodalan bank **tidak ada perubahan.** Struktur permodalan Bank yang terakhir adalah sebesar Rp 13.610.000,- sesuai dengan Akte Notaris Nomor : 31 tanggal 14 Oktober 2019, Notaris Ny. Djumini Setoadi,SH.M.Kn di Jakarta dengan Persetujuan Kemenkumham No. AHU.AH.01.03.0346064 tanggal 15 Oktober 2019, dengan Pencatatan OJK No. No. S-416/KR.0313/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Pencatatan Penambahan Modal Disetor.

⇨ Dengan komposisi kepemilikan BPR sebagai berikut :

	Nominal	**%**
PT. Sentra Modal Harmoni	12,115,000,000	89.01%
PT. Fajar Mas Murni	1,495,000,000	10.99%
JUMLAH	**13,610,000,000**	**100 %**

⇨ Dengan Daftar Kepemilikan sebagai berikut :

1.	Nama	PT. Sentra Modal Harmoni
	Alamat	Gedung Menara Hijau Lt. 5. Jalan M.T Haryono Kav 33 Cikoko, Pancoran, Jakarta
	Jenis	Badan Hukum
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	12,115,000,000
	Persentase kepemilikan	89.01%
2.	Nama	PT. Fajar Mas Murni
	Alamat	Jln. Raya Narogong No. 214 Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat
	Jenis	Badan Hukum
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	1,495,000,000
	Persentase kepemilikan	10.99%

⇨ Dengan Ultimate Shareholder :

Nama Ultimate Shareholder	PT. Sentra Modal Harmoni

BAB IV

PERKEMBANGAN USAHA BPR

A. RIWAYAT PENDIRIAN BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
No Akta Pendirian	109
Tanggal Akta Pendirian	29 September 1989
Nomor Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	69
Nomor Pengesahan dari Instansi Yang Berwenang	31
Tanggal Pengesahan dari Instansi Yang Berwenang	14 Oktober 2019
Tangggal Beroperasi	17 Februari 1990
Bidang Usaha Sesuai Anggarn Dasar	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan. Memberikan kredit bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah. Serta menjalankan usaha-usaha lain dalam lapangan perbankan pada umumnya sejauh apa yang diperkenankan oleh pemerintah kepada BPR, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya
Tempat Kedudukan	Jl Raya Gondang No 30. Cepiring Kendal
Opini Akuntan Publik	Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Ridwan Saleh, Ak., CA., CPA

B. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	Dec-23	Dec-24	PERTUMBUHAN	
			Rp	%
ASET	325.933.279	347.178.243	21.244.964	6,52%
KYD	256.959.367	286.626.689	29.667.322	11,55%
TABUNGAN	132.776.789	144.165.426	11.388.638	8,58%
DEPOSITO	111.247.830	121.774.287	10.526.457	9,46%
ABA	57.692.379	46.510.785	(11.181.594)	-19,38%
ABP	2.000.000	9.500.000	7.500.000	375,00%
PINJ BANK LAIN	27.050.000	24.183.333	(2.866.667)	-10,60%
PINJ DARI PIHAK KETIGA	19.558.863	16.047.550	(3.511.313)	-17,95%
PENDAPATAN	57.918.288	61.494.096	3.575.807	6,17%
BIAYA	46.671.145	52.661.836	5.990.691	12,84%
L/R SBLM PAJAK	11.247.143	8.832.259	(2.414.884)	-21,47%
L/R STLH PAJAK	8.505.481	6.831.909	(1.673.572)	-19,68%

C. KUALITAS ASET PRODUKTIF & RASIO KEUANGAN

PT BPR NUSAMBA CEPIRING
KUALITAS ASET PRODUKTIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Kredit	Penempatan Pada Bank Lain	Jumlah 2024
1. Aset Produktif			
- Lancar	212.861.367.414	46.510.785.438	259.372.152.852
- Dalam Perhatian Khusus	60.796.182.717	-	60.796.182.717
- Kurang lancar	837.056.556	-	837.056.556
- Diragukan	1.080.521.814	-	1.080.521.814
- Macet	11.051.560.609	-	11.051.560.609
Jumlah	286.626.689.109	46.510.785.438	333.137.474.547
2. Aset Produktif Yang Diklasifikasikan			
- Kurang Lancar (50%)	418.528.278,00		418.528.278
- Diragukan (75%)	810.391.360		810.391.360
- Macet (100%)	11.051.560.608,57		11.051.560.609
Jumlah	12.280.480.247	-	12.280.480.247
3. Agunan Yang Diperhitungkan			
- Lancar	22.296.468.972	-	22.296.468.972
- Dalam Perhatian Khusus	55.479.001.061	-	55.479.001.061
- Kurang lancar	744.006.335	-	744.006.335
- Diragukan	996.845.949	-	996.845.949
- Macet	10.307.917.704	-	10.307.917.704
JUMLAH	89.824.240.021	-	89.824.240.021
4. PPAWD (setelah diperhitungkan agunan)			
- Lancar (0,5%)	236.956.968.461	118.715.419	1.185.378.419
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	159.515.450	-	159.515.450
- Kurang lancar (10%)	9.305.022	-	9.305.022
- Diragukan (50%)	41.837.932	-	41.837.932
- Macet (100%)	743.642.905	-	743.642.905
	237.911.269.769	**118.715.419**	**2.139.679.728**
RASIO - RASIO	Aset Produktif Yang Diklasifikasikan / Aset Produktif		3,69%
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif / PPAP Yang Wajib Dibentuk		100,00%
	NPL Bruto		*12.969.138.978*
	Rasio NPL Bruto		4,52%
	NPL Netto		*12.174.353.119*
	Rasio NPL Netto		4,25%
PPAP Yang dibentuk BPR			2.139.679.728
PPAP YANG (KURANG) LEBIH BENTUK			0

KETERANGAN	31 Des 2024
	(1)
1. Bad Debt Ratio(%) / Rasio KAP	3.69 %
2. NPL Bruto (%)	4.52 %
3. NPL Net (%)	4.25 %
4. Rasio KPMM (%)	19.77 %
5. Loan to Deposit Ratio / LDR (%)	107.78 %
6. Return on Asset / ROA (%)	2.72 %
7. Return on Equity / ROE (%)	30.35 %
8. Cash Ratio (CR)	13.61 %
9. Rasio Efisiensi (%) / BOPO	85.64 %

D. RASIO NPL DAN PENYEBAB UTAMANYA

Kualitas Kredit Yang Diberikan sampai dengan bulan Desember 2024 :

Keterangan	31 Desember 2024	
	Rp	%
- Lancar	212,861,367,414	74.26%
- Dalam Perhatian Khusus	60,796,182,717	21.21%
- Kurang lancar	837,056,556	0.29%
- Diragukan	1,080,521,814	0.38%
- Macet	11,051,560,609	3.86%
Kredit Yang Diberikan	286,626,689,109	100.00%
NPL Rp	12,969,138,978	
NPL %	4.52%	

Penyebab Utama terjadi kredit bermasalah antara lain :

a) Usaha debitur mengalami penurunan omzet bahkan kebangkrutan.
b) Cash flow debitur terganggu karena pemasukan tidak lancar
c) Penjualan barang jaminan yang belum berhasil
d) Debitur tidak kooperatif dalam penyelesaian NPL karena cenderung sensitif/emosional
e) Diketahui ternyata debitur memiliki banyak hutang, utamanya kepada non bank.

E. PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

a. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan

Pada periode laporan tahun 2024 tidak terdapat penambahan atau pengurangan kegiatan dan atau usaha jaringan kantor

b. Perubahan Penting Lainya

Terjadi perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No. 45 tanggal 19 Desember 2024 mengenai persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK No. 7 Tahun 2024, Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, serta Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan. Maka dari itu, Perseroan Terbatas ini bernama "PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Pecangaan" atau disingkat "PT BPR Nusamba Cepiring.

BAB V
STRATEGI & KEBIJAKAN MANAJEMEN

A. MANAJEMEN UMUM

Dalam rangka mengembangkan usaha BPR memerlukan dukungan dengan strategi dan kebijakan yang baik agar target dan tujuan Perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2024 telah digariskan beberapa strategi dan sasaran yang akan dicapai, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pendanaan
b. Bidang Perkreditan
c. Bidang SDM Dan Operasional
d. Bidang Penanganan Kredit Bermasalah

Dari beberapa sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Pendanaan

Untuk bidang pendanaan prioritasnya pada sumber dana pihak ketiga yang terbagi atas tabungan dan deposito. Strategi yang telah dilakukan antara lain :

- ✓ Mereview bunga tabungan dan deposito secara periodik untuk menyesuaikan dipasaran dan tingkat suku bunga LPS.
- ✓ Meningkatkan kualitas mutu pelayanan.
- ✓ Menggalakkan promosi produk tabungan Sijari (Simpanan Berjangka Mandiri) dan Sehati (Simpanan Hari Tua Mandiri) maupun Tabungan Harmoni Premium
- ✓ Menggalakkan produk ”TabunganKu” dan ”Tabungan Simpel” yang merupakan program Tabungan Bank Indonesia dan Pemerintah.
- ✓ Mengembangkan Produk Deposito Super Plus yang merupakan produk Deposito bersama BPR Nusamba Group.
- ✓ Mengadakan undian berhadiah Tabungan Harmoni Plus yang merupakan produk Tabungan bersama BPR Nusamba Group.
- ✓ Pemberian hadiah langsung melalui produk Tabungan Emas.
- ✓ Pemberdayaan Wilayah Kantor Kas yang ada agar lebih optimal.
- ✓ Peningkatan Kualitas SDM dibidang Pemasaran Dana.

2) Bidang Perkreditan

⇨ Dalam bidang perkreditan sasaran yang akan dicapai diantaranya :

- ❑ Meningkatkan volume kredit

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Pencairan kredit dengan tetap memperhatikan *prudential banking*
- ✓ Evaluasi suku bunga kredit
- ✓ Mempercepat proses pelayanan kredit
- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas kredit
- ✓ Menggalakkan promosi
- ✓ Meningkatkan kontribusi kantor cabang
- ✓ Penambahan Account Officer sesuai kebutuhan

❑ Menjaga kualitas aktiva produktif

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Menciptakan system monitoring kredit yang tersistem dan terpadu
- ✓ Meningkatkan penagihan kredit NPL secara berkesinambungan
- ✓ Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit
- ✓ Penambahan SDM dibidang P2K
- ✓ Evaluasi kinerja bidang P2K
- ✓ Penyelesaian Kredit macet melalui jalur hukum.

❑ Meningkatkan tertib administrasi kredit

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Menatausahakan tertib dokumen kredit
- ✓ Menatatertibkan informasi kredit
- ✓ *Recheck* dokumen kredit
- ✓ Peningkatan pengawasan dokumen kredit
- ✓ Meningkatkan pengawasan berjenjang
- ✓ Saldering jaminan secara periodik dan berkesinambungan.

❑ Meningkatkan Kualitas Pelayanan

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Meningkatkan proses penanganan kredit bermasalah
- ✓ Meningkatkan kinerja bidang P2K
- ✓ Meningkatkan monitoring kredit
- ✓ Melakukan penyelesaian kredit secara kekeluargaan
- ✓ Melakukan penghapusan kredit bermasalah.
- ✓ Pengembangan kualitas SDM melalui pelatihan khususnya di perkreditan dalam rangka mendukung tujuan Perusahaan

3) Bidang SDM Dan Operasional

⇨ Dalam bidang Operasional sasaran yang akan dicapai diantaranya :

❑ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Secara periodik mengadakan training dan pengembangan
- ✓ Mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan baik yang diadakan oleh group maupun pihak lain
- ✓ Secara intensif mengadakan pembinaan kepada karyawan
- ✓ Melakukan study banding kepada BPR yang telah berhasil
- ✓ Memberikan *reward dan punishment* kepada karyawan.
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan karyawan

❑ Meningkatkan kepatuhan prosedur operasional dan prosedur kredit

→ Strategi yang dilakukan :

- ✓ Peningkatan peran internal audit
- ✓ Evaluasi / *rechek* hasil kerja baik harian maupun bulanan
- ✓ Menjalankan prosedur akuntansi yang benar
- ✓ Peningkatan kualitas sistem komputerisasi

4) Bidang Penanganan Kredit Bermasalah

⇨ Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas kredit, strategi yang akan dicapai diantaranya :

1. Meningkatkan monitoring kredit sedini mungkin
2. Meningkatkan kinerja tim penyelesaian kredit bermasalah
3. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara kekeluargaan
4. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui team Khusus yaitu team Legal
5. Kerjasama dengan Law Firm dan LBH

B. KEBIJAKAN TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO BPR

1. Tata Kelola

Bank telah menerapkan tata Kelola sesuai dengan Peraturan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan juga telah melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 12 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2024

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor Tata Kelola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai akhir Faktor
NILAI FAKTOR	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2
PREDIKAT KOMPOSIT	PERINGKAT 2												

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2024, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Akhir Faktor	**Predikat Komposit**
2	Peringkat 2

Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Manajemen Risiko

BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan POJK No 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Proses manajemen risiko yang diterapkan secara komprehensif pada 6 (enam) risiko yang wajib dikelola BPR Nusamba Cepiring yaitu, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi & Risiko Strategi.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

a. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen risiko
d. Sistem Pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

   Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain :

   - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
   - Direksi telah menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.
   - Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.
   - Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR dibawah Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan Struktur & Pedoman Kerja (Job Desk) karyawan, Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas dan fungsi meliputi tugas kepatuhan, manajemen risiko, dan APU PPT.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Limit

   Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanal Manajemen Risiko dan telah di evaluasi setiap tahun di tahun 2024 Bank telah mengevaluasi limit yang telah ada.

   Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, *risk appetite*, kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan

otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance* dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas adalah :

a) Aktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan, Risiko Reputasi & Risiko Strategi
b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pegelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

a) Identifikasi Risiko;

Dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan bank;

b) Pengukuran Risiko;

Digunakan untuk mengukur eksposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendaliandan dilakukan secara berkala;

c) Pemantauan Risiko;

Dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposure risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko;

d) Pengendalian Risiko;

Digunakan bank untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang dalam hal ini termasuk penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian;

e) Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran.

Klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

a) Low untuk skor 80 – 100

b) Low to Moderate untuk skor 60 s/d 80

c) Moderate untuk kor 40 s/d 60

d) Moderate to High untuk skor 20 s/d 40

e) *High untuk skor kurang dari sama dengan 20*

Dalam rangka membatasi risiko yang dapat diambil maka ditetapkan berbagai limit *eksposure* dan penetapan toleransi risiko antara lain :

a) Limit transaksi
b) Limit volume transaksi
c) Limit nasabah dan counterparty
d) Limit pihak terkait
e) Limit industry/sektor ekonomi dan wilayah

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar ekses modal atau kelebihan modal diatas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

4. Sistem Pengendalian Intern

Pengembangan Budaya Manajemen risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

BPR Nusamba Cepiring senantiasa melakukan perbaikan –perbaikan pengedalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan risk control system yang baik, dan mendeteksi timbulnya penyimpangan /fraud secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal dilakukan bersama-sama oleh unit kerja bersangkutan, Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit sebagai berikut :

1) Pejabat bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat pada unit kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasanya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada unit kerja yang berwenang.
2) Fungsi Internal Kontrol/ Fungsi Kepatuhan Internal bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku oleh unit kerja.

3) Unit manajemen risiko yang sekaligus merangkap fungsi kepatuhan melakukan pengawasan tidak langsung melalui pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif dengan alat ukur dan alat control yang telah dikembangakan oleh fungsi manajemen risiko.
4) Fungsi Pengendalian internal (SKAI) melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang di laksanakan pada masing- masing unit kerja.

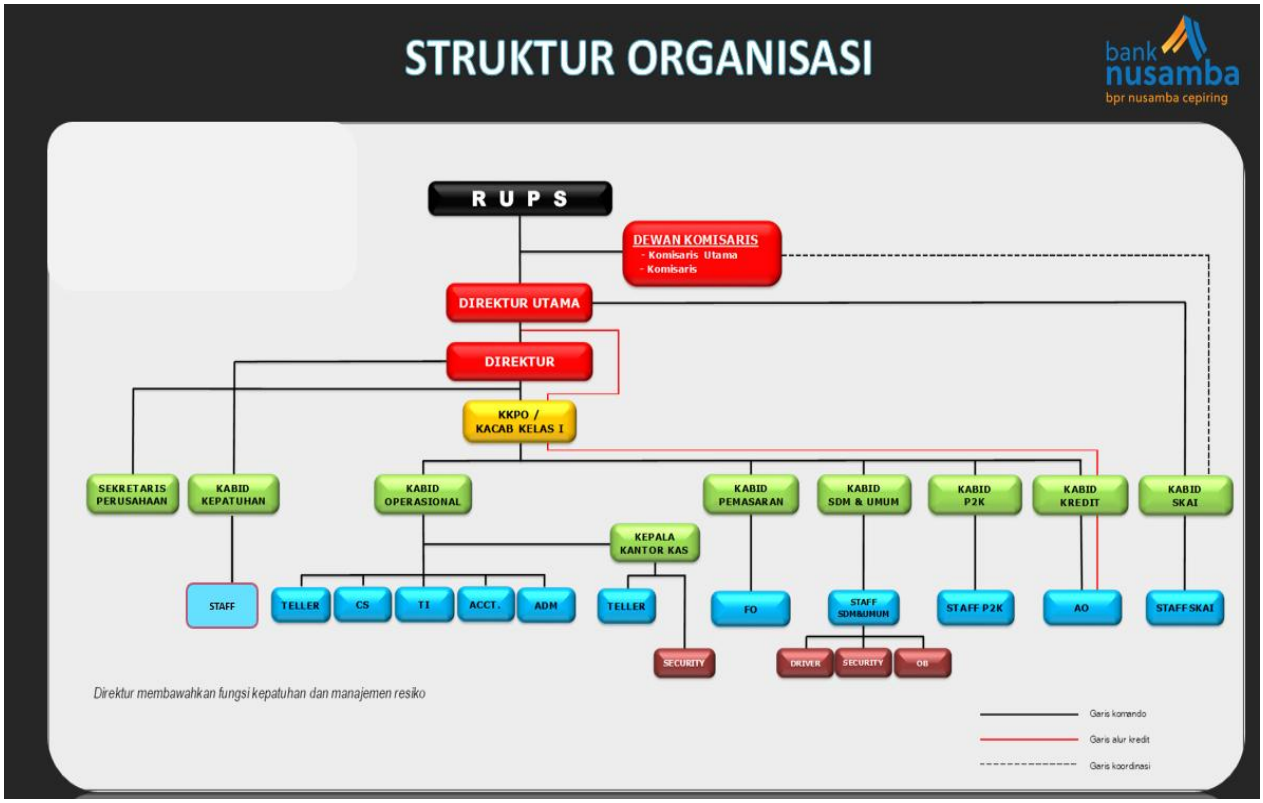
Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

1) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
4) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7) Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
8) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
9) Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
10) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat materiil dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

BAB VI

LAPORAN MANAJEMEN

A. STRUKTUR ORGANISASI



B. BIDANG USAHA

Kegiatan Bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Adapun kegiatan Utama bank adalah :

❑ Penyaluran Kredit

Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01 (Produk dasar)	Kredit Harmoni Plus	Produk Penyaluran dana dalam bentuk Kredit Berhadiah yang diundi setiap satu tahun sekali pada masa akhir periode dengan ketentuan tertentu
01 (Produk dasar)	Kredit Harmoni Tepat Guna	Produk Penyaluran dana dalam bentuk Kredit yang mendapatkan insentif berupa cash back sebesar 0,25 % dari plafond pada saat debitur melakukan pembayaran tepat waktu
01 (Produk dasar)	Kredit Mitra Pasar	Penyaluran Dana dalam bentuk kredit yang diberikan untuk masyarakat di lingkungan pasar
01 (Produk dasar)	Kredit Mitra Rakyat	Penyaluran dana produktif untuk modal kerja 5 jt sd 50 jt
01 (Produk dasar)	Kredit Mitra Usaha	Penyaluran dana produktif untuk modal kerja 5 jt sd 500 jt
01 (Produk dasar)	Kredit Sarana Griya	Kredit yang diberikan untuk pengembang / developer dalam mengembangkan perumahan
01 (Produk dasar)	Kredit Griya Sejahtera	Kredit yang diberikan untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah impian
01 (Produk dasar)	Kredit Kendaraan bermotor	Kredit yang diberikan untuk masyarakat dalam mewujudkan kendaraan bermotor impiannya

❑**Penghimpunan Dana**

✓ **Tabungan**

Dalam penghimpunan tabungan PT. BPR Nusamba Cepiring masih mengandalkan produk-produk tabungan berhadiah baik hadiah langsung maupun melalui undian, adapun produk – produk tabungan tersebut adalah :

Nama Produk	Uraian
Tabungan Ku	Tabungan untuk siswa
Tabungan Simpel	Tabungan untuk siswa
Tabungan Harmoni Plus	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Tabungan yang mendapatkan nomor undian yang diundi setiap satu tahun sekali
Tabungan Emas	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Tabungan yang mendapatkan point yang dapat ditukarkan hadiah pada akhir tahun
Tabungan Harmoni Prer	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Tabungan yang mendapatkan bunga setara dengan Deposito
Tabungan Sehati	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Tabungan Simpanan Hari Tua Mandiri
Tabungan Sijari	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Tabungan berjangka Mandiri

✓ **Deposito**

Tingkat suku bunga Deposito yang berlaku yakni sbb :

Nama Produk	Uraian
Deposito Nusamba	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Deposito berjangka 1,3,6,12 sd 60 bulan
Deposito Super Plus	Produk Unggulan BPR Nusamba cepiring berupa Deposito berjangka 1,3,6,12 sd 60 bulan dan mendapatkan hadiah langsung dari point yang didapatkan berdasarkan nominal dan jangka waktu penempatan

C. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi menggunakan Core Banking “BPR 1” dari Vendor PT. Telkom Sigma dengan menggunakan server AS 400. Sistem jaringan On Line System real time dengan menggunakan jaringan VPN Telkom.

✓ **Sistim Keamanan**

Dalam menjaga keamanan kantor, Bank telah memasang CCTV disetiap kantor dan setiap saat selalu dipantau keakuratan jaringannya.

✓ **Penyedia Teknologi Informasi**

- Website : https://nusambacepiring.com/
- Email : bpr_cepiring@yahoo.com / office@bprnusambacepiring.com
- Telpon : (0294) 382234,384234, Fax (0294) 384384

D. PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun perkembangan dan target pasar menunjukkan peningkatan. Dari beberapa pos inti neraca yakni Tabungan, Deposito, Kredit Yang Diberikan, Laba/rugi dan Volume Usaha dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan, namun jika dibanding dengan target masih terdapat pos belum tercapai seperti :

a) Asset : tercapai sebesar 96,09 %

b) KYD : tercapai sebesar 97,80 %

c) Tabungan : tercapai sebesar 98,89 %

d) Deposito : tercapai sebesar 104,57 %

e) Laba (setelah Pajak) : tercapai sebesar 71,81 %

Target pasar yang utama yakni memperluas jaringan pelayanan bagi wilayah yang belum tersentuh oleh pelayanan PT. BPR Nusamba Cepiring melalui pemetaan wilayah masing-masing jaringan kantor. Secara rinci sebagai berikut :

KETERANGAN	Dec-23	Dec-24	PERTUMBUHAN		TARGET DESEMBER 2024	DEVIASI	PENC (%)
			Rp	%			
ASET	325.933.279	347.178.243	21.244.964	6,52%	361.307.327	(14.129.083)	96,09%
KYD	256.959.367	286.626.689	29.667.322	11,55%	293.062.158	(6.435.469)	97,80%
TABUNGAN	132.776.789	144.165.426	11.388.638	8,58%	145.788.919	(1.623.492)	98,89%
DEPOSITO	111.247.830	121.774.287	10.526.457	9,46%	116.450.184	5.324.103	104,57%
ABA	57.692.379	46.510.785	(11.181.594)	-19,38%	49.747.426	(3.236.640)	93,49%
ABP	2.000.000	9.500.000	7.500.000	375,00%	2.000.000	7.500.000	475,00%
PINJ BANK LAIN	27.050.000	24.183.333	(2.866.667)	-10,60%	-	24.183.333	0,00%
PINJ DARI PIHAK KETIGA	19.558.863	16.047.550	(3.511.313)	-17,95%	56.172.390	(40.124.840)	28,57%
PENDAPATAN	57.918.288	61.494.096	3.575.807	6,17%	67.297.186	(5.803.090)	91,38%
BIAYA	46.671.145	52.661.836	5.990.691	12,84%	54.779.720	(2.117.884)	96,13%
L/R SBLM PAJAK	11.247.143	8.832.259	(2.414.884)	-21,47%	12.517.466	(3.685.207)	70,56%
L/R STLH PAJAK	8.505.481	6.831.909	(1.673.572)	-19,68%	9.513.390	(2.681.481)	71,81%

E. JUMLAH, JENIS & LOKASI ALAMAT KANTOR

Seluruh kegiatan operasional dan layanan PT BPR Nusamba Cepiring diselenggarakan di 1 (satu) Kantor Pusat, 5 (lima) Kantor Cabang, dan 11 (tujuh) Kantor Kas. Adapun lokasi dan kedudukan perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat
   Jl. Raya Gondang No. 30. Kec. Cepiring. Kab Kendal
   Telp/Fax : 0294 - 382 234 Fax : 0294 - 384 384
   Email : bpr_cepiring@yahoo.com

2. Kantor Cabang:
   - Cabang Kaliwungu
     Jl. Raya Timur Kaliwungu No. 67 – Kendal. Telp. (0294) 383177
     Izin operasi Persetujuan Bank Indonesia atau OJK dengan No. 10/2175/DKBU/IDAd/ Sm.

   - Cabang Boja
     Jl. Pemuda No. 45 Boja – Kendal. Telp.(0294) 572808
     Izin operasi Persetujuan Bank Indonesia atau OJK dengan No. S-177/KR.031/2018

- Cabang Bergas
  Ruko Permata Karangjati Blok A-2 Karangjati
  Izin operasi Persetujuan Bank Indonesia atau OJK dengan No.S-142/KR.031/2022

- Cabang Ambarawa
  Ruko Tanjungsari No. 35 G Kupang Ambarawa
  Izin operasi Persetujuan Bank Indonesia atau OJK dengan No. 142/KR.031/2022

- Cabang Ungaran
  Jl. Diponegoro No. 745 Ungaran - Semarang Telp. (024) 6925858
  Izin operasi Persetujuan Bank Indonesia atau OJK dengan No.10/2175/DKBU/IDAd/ Sm

3. Kantor Kas:

- Kantor Sukorejo

  Jl. Raya Sudagaran No. 22 Sukorejo – Kendal. Telp.(0294) 451131

- Kantor Kas Weleri

  Jl. Raya Utama No. 251 Weleri – Kendal. Telp. (0294) 641362

- Kantor Kas Kas Kendal

  Jl. Soekarno Hatta No. 271 Kendal. Telp. (0294) 382727

- Kantor Kas Pegandon

  Jl. Raya Raya Pegandon No. 20 Pegandon - Kendal. Telp. (0294) 3686567

- Kantor Kas Cepiring

  Jl. Raya Sri Agung No. 26- Gemuh - Cepiring - Kendal Tlp. 0294 - 382828

- Kantor Kas Limbangan

  Jl. Raya Limbangan - Boja No. 11 Kendal. Telp.(0294) 3673045

- Kantor Kas Ungaran Barat

  Jl. Muh. Yamin No. 11 bandarjo Ungaran Barat

- Kantor Kas Bandungan

  Jl. Tirtomulyo No. 57, Bandungan - Semarang Tlp. (0298) 712500

- Kantor Kas Bawen

  Jl. Soekarno Hatta Km Ds Gandekan RT. 2/6 Bawen

- Kantor Kas Jambu

  Dsn Krajan RT. 6/1 Desa Kelurahan Jambu

- Kantor Kas Tuntang

  Ngreco Desa Kesongo, RT. 1/4 Kesongo Tuntang

F. KERJA SAMA DAN MITRA USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA

Mitra usaha yang telah terjalin selama ini diantaranya dengan bank lain dalam penempatan Dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito (Antar bank Aktiva) dan penempatan dari bank lain dalam bentuk tabungan dan Deposito (Antar bank Pasiva). Dalam kerjasama antarbank aktiva dan pasiva diantaranya dengan Bank Umum dan BPR Grup.

Selain itu Kerjasama dengan Lembaga lain antara lain

a) PT Mitra Harmoni Insurance Broker (Asuransi)
b) PT Sarana Multi Griya Persero (SMF)
c) German Sparkasentiftung
d) International Labour Organitation (ILO)
e) Kementrian PUPR

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. BIDANG TUGAS & KOMPOSISI KARYAWAN

Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia PT. BPR Nusamba Cepiring berjumlah 230 orang. Adapaun rincian Pengurus dan karyawan, antara lain :

Rekapitulasi pendidikan SDM PT.BPR Nusamba Cepiring sampai akhir Tahun 2024 :

Jabatan	2024	2023
Komisaris	2	2
Direksi	2	2
Sekper	1	1
Kepala Cabang	6	6
Kepala Bidang	23	22
Kepala Kantor Kas	11	11
Staf	131	106
Pegawai Kontrak	28	46
Satpam	4	4
OB & Sopir	6	3
Outsourching	16	20
Jumlah Personalia	**230**	**223**

B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA & KEGIATAN PENGEMBANGAN

Sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran tahun 2024, PT. BPR Nusamba Cepiring sangat memperhatikan peningkatan ataupun kemajuan Sumber Daya Manusianya, yaitu menjadikan SDM yang tangguh dan potensial sebagai modal utama untuk meningkatkan kinerja Perusahaan baik dimasa sekarang maupun untuk yang akan datang.

Adapun program – program pengembangan SDM tersebut, bisa meliputi inhouse Training , Seminar, Loka Karya, Study Banding ke BPR lainnya maupun pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BPR sendiri maupun dari pihak luar seperti Perbarindo ataupun Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan akhir tahun 2024 ini telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM antara lain :

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
Workshop	**20240115**	Workhsop Sertifikasi Trainer Saving Game
PELATIHAN	**20240115**	IN HOUSE TRAINNING KARYAWAN BARU
Motivasi Hidup Sehat & Bahagia	**20240119**	Motivasi Hidup Sehat & Bahagia Untuk mewujudkan kesuksesan Dunia Akhirat
PENDAMPINGAN PELATIHAN SDM	**20240101**	PENDAMPINGAN PELATIHAN SDM BPR NUSAMBA CEPIRING BULAN JANUARI 2024
PELATIHAN	**20240121**	TOT MODUL PELATIHAN INDUKSI KARYAWAN BARU BPR
Workshop	**20240125**	Workshop Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023
PELATIHAN	**20240130**	pelatihan aplikasi digital SIP CKPN
SOSIALISASI	**20240106**	SOSIALISASI POJK BMPK BPR & KICK OFF MEETING RBB 2024
PELATIHAN	**20240202**	UPGRADING SKEMA PEMBIAYAAN MMQ & PEMBIAYAAN SINDIKASI
SOSIALISASI	**20240205**	SOSIALISASI PENDALAMAN MATERI PMK - 168 & TUTORIAL E - BUPOT
SOSIALISASI	**20240126**	SOSIALISASI STRATEGI ANTI FRAUD,APUPPT & PPSPM DAN KICK OFF RBB TH 2024
SHARING SESSION	**20240229**	SHARING SESSION BIDANG PEMASARAN DANA
PELATIHAN	**20240302**	PELATIHAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SAK EP
SEMINAR	**20240306**	SEMINAR NASIONAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PELATIHAN	**20240422**	ON THE JOB TRAINING KARYAWAN BARU
PELATIHAN	**20240513**	PELATIHAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BAGI BPR
PELATIHAN	**20240529**	PELATIHAN PEMANTAPAN IMPLEMENTASI CKPN SESUAI SAK EP BPR/S
SHARING SESSION	**20240606**	SHARING BANTUAN HUKUM LITIGASI
BIMBINGAN TEKNIS	**20240610**	BIMBINGAN TEKNIS PENGHAPUSAN FIDUSIA GUNA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM
BIMBINGAN TEKNIS	**20240613**	BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN TOOLS ASESMEN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PELATIHAN	**20240615**	PELATIHAN THE POWER OF LEADERSHIP
Workshop	**20240620**	WORKSHOP ISO 27001
SEMINAR DAN BPR AWARD	**20240621**	SEMINAR DAN BPR AWARDING TOP 100 BPR 2024
SOSIALISASI	**20240625**	SOSIALISASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK&EVALUASI HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK
PELATIHAN	**20240627**	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO PENGENALAN ALAT KERJA RISK CONTROL SELF ASESSMENT
SEMINAR DAN BPR AWARD	**20240829**	SEMINAR & BPR AWARD 2024
PELATIHAN	**20240702**	PJJ PENYEGARAN DIREKTUR TK 1
PELATIHAN	**20240703**	ON THE JOB TRAINNING KARYAWAN BARU
PELATIHAN	**20240704**	PELATIHAN LEADERSHIP STYLE INVENTORY
PELATIHAN	**20240708**	PELATIHAN KREDIT USAHA MIKRO (KUM) BAGI ACCOUNT OFFICER
PELATIHAN	**20240708**	TRAINING OF TARINER MICRO BUSINESS GAME (MBG)
PELATIHAN	**20240709**	PROGRAM TRAINNING KREDIT DAN CO LENDING
PELATIHAN	**20240710**	PELATIHAN APLIKASI PERHITUNGAN CKPN
Workshop	**20240711**	WORKSHOP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
SOSIALISASI	**20240715**	SOSIALISASI PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA
SEMINAR	**20240725**	SEMINAR HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN DAN PERIKATAN SERTA PENANGANAN PERMASALAHAN KREDIT
PELATIHAN	**20240805**	PENDAMPINGAN ACCOUNT OFFICER PROGRAM KREDIT USAHA MIKRO
SOSIALISASI	**20240806**	SOSIALISASI SERTIFIKAT ELELTRONIK BPR/S NUSAMBA & MITRA HARMONI GROUP
PELATIHAN	**20240806**	PELATIHAN TATAP MUKA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PEJABAT EKSEKUTIF (PE) BISNIS &OPERASIONAL BPR
SOSIALISASI	**20240808**	SOSIALISASI TEKNIS PENUTUPAN ASURANSI DAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PERBANKAN
PELATIHAN	**20240809**	PELATIHAN KETENTUAN POJK NO 1 TH 2024 TENTANG KUALITAS ASET BPR,ASPEK LEGAL PERIKATAN KREDIT DAN AGUNAN SERTA KREDIT SINDIKASI DAN ONE OBLIGOR
PELATIHAN	**20240814**	PELATIHAN LEADERSHIP ARE YOU EXCECUTOR & ARE YOU LEADER
PELATIHAN	**20240823**	PELATIHAN LEADERSHIP CREATIVE PROBLEM SOLVING&DCISION MAKING
BIMBINGAN TEKNIS	**20240826**	BIMBINGAN TEKHNIS PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI KABUPATEN KENDAL
PELATIHAN & WORKSHOP	**20240826**	TRAINNING & WORKSHOP SAK EP TELKOM SATU SIGMA
SOSIALISASI	**20240904**	SOSIALISASI KREDIT MITRA RAKYAT
PELATIHAN	**20240907**	PELATIHAN LEADERSHIP TERRITORIAL SKILL FOR FINANCIAL INSTITUTIONS
SEMINAR	**20240911**	SEMINAR,RAKERDA DAN HARMONISASI PERBARINDO DPD JAWA TENGAH
PELATIHAN	**20240912**	EDUKASI CORETAX DAN PENGENALAN CORETAX KEPADA WAJIB PAJAK
TALKSHOW	**20240918**	TALKSHOW &LAUNCHING BUKU KEAMANAN SIBER BANK
SOSIALISASI	**20240924**	SOSIALISASI SKEMA KERJASAMA KEAGENAN KORPORASI BPR/BPRS DI KOTA SEMARANG
PELATIHAN	**20241007**	TOT PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYALURAN DANA PILOT PROJECT IGAHP DARI BUILD CHANGE
Workshop	**20241010**	WORKSHOP IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT KERJA RISK CONTROL SELF ASSESSMENT SERTA SOSIALISASI KATALOG RISIKO BPR/BPRS
PELATIHAN	**20241014**	PELATIHAN ANALISA KREDIT/ PEMBIAYAAN MIKRO BERBASIS RISIKO 14-15 OKTOBER 2024
PELATIHAN	**20241018**	PELATIHAN PROGRAM PENELIHARAAN SERTIFIKASI SDM BPR BERBASIS KOMPETENSI WILAYAH DPD PERBARINDO DKI JAKARTA 18-20 SEPTEMBER 2024
SEMINAR	**20241018**	SEMINAR NASIONAL DAN RAKERNAS PERBARINDO 2024
PELATIHAN	**20241021**	FGD TERRITORIAL SKILL FOR FINANCIAL INSTITUTIONS BATCH 2
SOSIALISASI	**20241114**	SOSIALISASI PROGRAM PREMI PENJAMINAN LPS
PELATIHAN	**20241118**	TRAINING OF TRAINER EDUKASI KEUANGAN KELUARGA
PELATIHAN	**20241120**	PELATIHAN APLIKASI DIGITAL SI-RAKB (SISTEM INFORMASI RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)
SURVEILLANCE	**20241120**	SURVEILLANCE ISO 27001;2022
PELATIHAN	**20241121**	WORKSHOP PEMBEKALAN PRAKTIK PDP DI SEKTOR PRIVAT
Workshop	**20241204**	WORKSHOP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 81 TAHUN 2024
BIMBINGAN TEKNIS	**20241218**	BIMTEK SIMULASI DAN MANAJEMEN KEPATUHAN PAJAK DAN PENGISIAN SPT PPH BADAN PASCA IMPLEMENTASI CORE TAX
DIKLAT	**20241218**	FGD OPTIMALISASI BIDANG LEGAL DAN METODE SCRAPPING DATA ANALISIS POTENSI DASAR PASAR BPR NUSAMBA GROUP
SEMINAR	**20241219**	SEMINAR DAN WEBINAR PAJAK PPH PASAL 21
MOTIVASI	**20241223**	MOTIVASI " WHO AM I MEMBANGKITKAN POTENSI DIRI UNTUK BERPRESTASI

Peserta atau bagian yang dikirim untuk mengikuti pendidikan tersebut selalu diwajibkan untuk mensosialisasikan/mempresentasikan ulang kepada karyawan lain ketika ada rapat atau meeting umum seluruh karyawan, sehingga dapat diimplementasikan materi pelatihan yang telah diperoleh.

Sesuai dengan POJK No. 47/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 5 % dari total Biaya Tenaga Kerja Tahun sebelumnya, **PT. BPR Nusamba Cepiring** pada tahun 2024 telah membentuk dan menggunakan Cadangan pendidikan

BAB VIII

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT BPR NUSAMBA CEPIRING
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	**Catatan**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
Kas	2.c, 3.1	693.759.500	891.032.700
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2.d, 3.2	4.162.773.309	3.567.271.898
Penempatan Pada Bank Lain	2.e, 3.3	46.510.785.438	57.692.379.420
Penyisihan Kerugian -/-	2.g, 3.3	(118.715.419)	(174.921.657)
Total		**51.248.602.828**	**57.517.457.763**
Kredit yang Diberikan			
Kredit Yang Diberikan	2.f, 3.4	286.626.689.109	256.959.366.652
Provisi	2.g, 3.4	(4.038.702.094)	(3.650.961.898)
Biaya Transaksi	2.g, 3.4	233.827.660	193.853.528
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan	2.g, 3.4	(85.423.351)	-
Penyisihan Kerugian -/-	2.g, 3.4	(2.020.964.309)	(1.788.207.833)
Agunan Yang Diambil Alih	2.g, 3.4	850.000.000	-
Total		**281.565.427.014**	**251.714.050.447**
Aset Tetap dan Inventaris	2.h, 3.5	18.972.503.457	15.896.876.844
Akumulasi Aset Tetap & Inventaris -/-		(8.153.567.068)	(6.947.681.122)
Total		**10.818.936.389**	**8.949.195.722**
Aset Tak Berwujud	2.i, 3.6	66.010.000	176.039.233
Amortisasi Aset Tak Berwujud -/-		(1.375.208)	(176.039.227)
Total		**64.634.792**	**6**
Aset Lain-Lain	2.j, 3.7	3.480.642.440	3.294.270.771
JUMLAH ASET		**347.178.243.464**	**325.933.279.306**

KEWAJIBAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban Segera Dibayar	2.k, 3.8	1.213.134.299	1.401.373.473
Utang Bunga	2.l, 3.9	386.414.850	341.973.734
Utang Pajak	2.m, 3.10	-	721.658.215
Simpanan	2.n, 3.11		
Tabungan		144.165.430.663	132.776.793.135
Deposito		120.011.594.493	109.611.587.497
Simpanan Dari Bank Lain	2.o, 3.12	9.500.000.000	2.000.000.000
Pinjaman Diterima		40.009.033.550	46.366.911.532
Kewajiban Lain-lain	2.q, 3.14	556.766.272	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**315.842.374.127**	**293.220.297.586**
EKUITAS			
Modal	2.r, 3.15		
Modal Dasar		20.000.000.000	20.000.000.000
Modal Belum Disetor		(6.390.000.000)	(6.390.000.000)
Modal Disetor		**13.610.000.000**	**13.610.000.000**
Saldo Laba			
Cadangan Umum	2.r, 3.16	2.722.000.000	2.722.000.000
Laba Belum Ditentukan Tujuannya	2.r, 3.17		
Laba Rugi Ditahan		8.171.959.846	7.875.500.363
Laba Rugi Tahun Berjalan		6.831.909.491	8.505.481.356
Jumlah Saldo laba		17.725.869.337	19.102.981.720
JUMLAH EKUITAS		**31.335.869.337**	**32.712.981.720**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**347.178.243.464**	**325.933.279.306**

B. LAPORAN LABA RUGI

PT BPR NUSAMBA CEPIRING
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	2.s, 3.18	54.118.334.706	50.745.976.792
Provisi dan Jasa Administrasi	2.s, 3.19	3.080.204.804	2.900.091.502
Biaya Transaksi	3.19	(155.335.115)	(124.774.796)
Total		57.043.204.396	53.521.293.498
Beban Bunga (-)	2.t, 3.20	(14.194.789.365)	(11.748.989.519)
Pendapatan Bunga Neto		42.848.415.030	41.772.303.978
Pendapatan Operasional Lainnya	2.s, 3.21	3.355.439.955	2.881.255.693
Jumlah Pendapatan Operasional		**46.203.854.986**	**44.653.559.672**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian	2.t, 3.22		
Beban Penyisihan Kerugian PPBL		(182.246.247)	(251.448.560)
Beban Penyisihan Kerugian Kredit		(989.602.879)	(1.576.497.803)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		(1.329.507.786)	(1.327.302.776)
		(2.501.356.912)	**(3.155.249.139)**
Beban Pemasaran	2.t, 3.23	(1.741.460.564)	(1.428.330.889)
Beban Penelitian & Pengembangan	3.24	(74.250.000)	-
Beban Administrasi dan Umum	2.t, 3.25	(33.837.545.229)	(29.777.673.970)
Jumlah Beban Operasional		**(38.154.612.705)**	**(34.361.253.998)**
Laba (Rugi) Operasional		**8.049.242.281**	**10.292.305.674**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	2.u, 3.26	6.106.630.911	1.515.739.187
Beban Non Operasional	2.v, 3.27	(5.323.613.770)	(560.901.776)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**783.017.141**	**954.837.411**
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		**8.832.259.422**	**11.247.143.085**
Taksiran Pajak Penghasilan	2.w, 3.28	(2.000.349.931)	2.741.661.728
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**6.831.909.491**	**8.505.481.356**

C. LAPORAN KOMITMEN & KONTINJENSI

Rekening Administratif Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Komitmen :		
- Fasilitas Pinjaman yang diterima yang belum digunakan	-	-
Kontijensi :		
- Bunga Kredit Dalam Penyelesaian	5.703.420.565	4.731.773.554
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	181.615.102	2.846.351.182
Jumlah Kontijensi	**5.885.035.667**	**7.578.124.735**
Komitmen:		
- Fasilitas Pinjaman yang diterima yang belum digunakan	(7.879.000.000)	2.846.351.182
Jumlah Komitmen	**(7.879.000.000)**	**18.002.600.653**
Jumlah Kontijensi dan Komitmen	**(1.993.964.333)**	

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PT BPR NUSAMBA CEPIRING
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	MODAL DISETOR	CADANGAN UMUM	BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA	JUMLAH
SALDO 31 DESEMBER 2022	**13.610.000.000**	**2.722.000.000**	**13.525.500.360**	**29.857.500.362**
Dividen Untuk Pemegang Saham	-	-	(4.800.000.000)	(4.800.000.000)
Bonus	-	-	(850.000.000)	(850.000.000)
Selisih Pembulatan	-	-	1	1
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-	-	8.505.481.356	8.505.481.356
SALDO 31 DESEMBER 2023	**13.610.000.000**	**2.722.000.000**	**16.380.981.718**	**32.712.981.720**
Dividen Untuk Pemegang Saham			(7.900.000.000)	(7.900.000.000)
Penyesuaian Koreksi OJK			(309.021.872)	(309.021.872)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan			6.831.909.491	6.831.909.491
SALDO 31 DESEMBER 2024	**13.610.000.000**	**2.722.000.000**	**15.003.869.337**	**31.335.869.337**

E. LAPORAN ARUS KAS

PT BPR NUSAMBA CEPIRING
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba (Rugi) Setelah Pajak	6.831.909.491	8.505.481.356
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	1.205.885.946	1.296.967.776
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan)		
Penempatan Pada Bank Lain	(56.206.237)	26.657.806
Kredit Yang Diberikan	(850.000.000)	30.503.277
Amortisasi :		
Aset Tidak Berwujud	(174.664.019)	176.039.227
Provisi dan Administrasi	387.740.196	853.533.498
Biaya Transaksi	(39.974.132)	(87.128.780)
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(595.501.412)	(621.376.071)
Kredit Yang Diberikan	(29.667.322.457)	(60.307.195.275)
Aset Lain - Lain	(186.371.670)	158.096.832
Kewajiban Segera	(188.239.175)	(268.909.007)
Utang Bunga	44.441.116	114.842.129
Utang Pajak	(721.658.215)	572.237.395
Simpanan	-	-
Tabungan	11.388.637.528	11.767.275.219
Deposito	10.400.006.996	11.613.427.497
Simpanan Dari Bank Lain	7.500.000.000,00	-
Pinjaman Diterima	-	-
Kewajiban Lain - Lain	556.766.272	(93.800)
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi	**5.835.450.228**	**(26.169.640.918)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	(3.075.626.613)	(1.702.801.510)
Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud	110.029.233	(176.039.233)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi	**(2.965.597.380)**	**(1.878.840.743)**
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Pembagian Dividen	(6.500.000.000)	(4.800.000.000)
Pinjaman Diterima	(6.357.877.982)	39.501.343.681
Selisih Pembulatan	-	1
Pembagian Bonus / Tantiem	(1.400.000.000)	(850.000.000)
Penyesuaian	9.157.952	-
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pendanaan	**(14.248.720.030)**	**33.851.343.682**
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS	**(11.378.867.182)**	**5.802.862.020**
KAS AWAL PERIODE	**58.583.412.120**	**52.780.550.100**
KAS AKHIR PERIODE	**47.204.544.938**	**58.583.412.120**
Kas dan Setara Kas :		
Kas	693.759.500	891.032.700
Penempatan Pada Bank Lain	46.510.785.438	57.692.379.420
Jumlah	**47.204.544.938**	**58.583.412.120**

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00071/2.0946/AU.2/07/0996-1/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BPR Nusamba Cepiring

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring (Perusahaan) terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan sebagai angka – angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 2 April 2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP JOJO SUNARJO DAN REKAN
NIU-KAP : KEP-440/KM.1/2013

00071

Ridwan Saleh, M.Ak, CA, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0996

21 Maret 2025

MANAGEMENT LETTER

Jakarta, 21 Maret 2025

Nomor : ML-004/KAPJSR-JKT/III/2025
Lampiran : -
Perihal : *Management Letter*

Kepada Yth :
Direksi
PT BPR Nusamba Cepiring

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan PT BPR Nusamba Cepiring (Perusahaan) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta telah mengeluarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00071/2.0946/AU.2/07/0996-1/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.

Sebagai bagian dari audit tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern perusahaan,seperti yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern perusahaan ini, bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap pengendalian intern perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami. Keadaan administrasi serta pengendalian intern perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama audit berlangsung kami menemukan kelemahan yang perlu mendapat perhatian pengurus untuk perbaikan selanjutnya.

Management Letter ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak luar perusahaan, untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan seluruh staf perusahaan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit.

Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pengurus terlampir adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur Masih Belum Mutakhir**
   Terdapat beberapa kebijakan dan prosedur dalam bentuk SOP yang masih menggunakan POJK lama. SOP yang masih belum mutakhir ini diantaranya yaitu:

SOP	POJK Lama	POJK Baru
SOP Pemberian Kredit Secara Tidak Langsung (Channeling) Melalui Fintech P2P Lending	1. POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat 2. POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang	1. POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS 2. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

SOP	POJK Lama	POJK Baru
	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat	
SOP Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud (SAF)	1. POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat	1. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.
SOP Pemberian Kredit Secara Tidak Langsung (Channeling) Melalui Fintech P2P Lending Komunal	1. POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat 2. POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat	1. POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS 2. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.
SOP Antar Jemput Transaksi dan Pengawasan Penggunaan Setoran Diluar Jam Kas, Pengelolaan Dokumen Perusahaan, Monitoring Agunan Kredit, dan Pengelolaan Likuiditas	1. POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat 2. POJK No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat	1. POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS 2. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Kriteria:
Kebijakan dan prosedur BPR harus selalu dimutakhirkan dan update sesuai dengan ketentuan yang terbaru.

Rekomendasi:
Sebaiknya dilakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur dengan mengacu ketentuan POJK terbaru, yaitu POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ke depannya, Bank juga perlu menyesuaikan antara kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan aturan dari POJK Terbaru.

2. Pembentukan CKPN

Berdasarkan POJK No. 1 Tahun 2024, PT BPR Nusamba Cepiring wajib membentuk CKPN guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tanggal 31 Januari 2025 antara PT Fajar Mas Murni yang diwakili oleh Tn. Ir. Simon Rewarto Rasid dan PT Sentra Modal Harmoni yang diwakili oleh Tn. Joko Suyanto, SE., MM telah disetujui penggunaan saldo laba ditahan tahun-tahun sebelumnya untuk pemenuhan kewajiban CKPN dengan alokasi sebesar Rp. 477.894.762,-.

Kriteria:
PT BPR Nusamba Cepiring melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio kredit dan perhitungan CKPN dan memastikan bahwa model perhitungan CKPN telah mempertimbangkan faktor risiko yang memadai serta metodologi yang dapat diuji kembali.

Rekomendasi:
Diperlukan upaya monitoring portofolio kredit guna mengantisipasi potensi kerugian akibat pembentukan CKPN di masa depan.

Manajemen diharapkan terus melakukan pemantauan dan penyesuaian agar kebijakan pembentukan CKPN tetap relevan dan sesuai dengan kondisi pasar serta regulasi yang berkembang.

3. **Perubahan Nomenklatur**
Terjadi perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn No. 45 tanggal 19 Desember 2024 mengenai persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan. Maka dari itu, Perseroan Terbatas ini bernama "PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring disingkat PT BPR Nusamba Cepiring". Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000055.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025 dan dicatat dalam tata administrasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-57/KO.13/2025 tanggal 22 Januari 2025.

4. **Estimasi Kewajiban Imbalan Kerja Perlu Dukungan Perhitungan dari Aktuaria**
BPR telah melaksanakan pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife dan BPJS Ketenagakerjaan yang berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) untuk karyawan/pekerja yang telah diangkat menjadi karyawan/pekerja tetap. Perusahaan juga telah bersedia membayar selisih apabila jaminan atau manfaat pensiun yang diterima karyawan/pekerja lebih kecil dari jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan.

Tetapi Perusahaan belum mendapatkan jumlah estimasi kewajiban imbalan kerja yang lebih akurat dan valid. Hal tersebut menjadikan nilai kewajiban imbalan kerja yang disajikan dalam laporan keuangan kurang memberikan keyakinan yang memadai bagi stakeholders.

Kriteria:
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BAB 23 tentang Imbalan Kerja:
1. Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, antara lain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kerja.
2. Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan.

Jika entitas mampu (tanpa biaya dan usaha yang tidak semestinya), maka entitas menggunakan metode projected unit credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban yang terkait.

Rekomendasi:
Perusahaan sebaiknya menggunakan metode projected unit credit yang mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, termasuk tingkat diskonto, tingkat imbal hasil aset program, tingkat kenaikan gaji, perputaran pekerja, mortalitas, dan kecenderungan tingkat biaya kesehatan. Untuk itu, mungkin diperlukan bantuan dari aktuaris independen dalam menghitung kewajiban imbalan kerja setiap tahun.

Demikian *Management Letter* ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaannya kami sampaikan Terima Kasih.

Hormat kami,

JOJO SUNARJO & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Ridwan Saleh, M.Ak., CA., CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP. 0996

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Gondang No. 30
Cepiring Kendal
T : (0294)382234, F : (0294)384384

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSAMBA CEPIRING

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bambang Susanto, S.E., M.M.
   Alamat Kantor : Jl. Raya Gondang No. 30, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah
   Nomor Telepon : (0294) 382 234
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Fitrianingsih, S.E.
   Alamat Kantor : Jl. Raya Gondang No. 30, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah
   Nomor Telepon : (0294) 382 234
   Jabatan : Direktur

3. Nama : Dwi Yono, S.E., M.M.
   Alamat Kantor : Jl. Raya Gondang No. 30, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah
   Nomor Telepon : (0294) 382 234
   Jabatan : Komisaris Utama

4. Nama : Joko Suyanto, S.E., M.M.
   Alamat Kantor : Jl. Raya Gondang No. 30, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah
   Nomor Telepon : (0294) 382 234
   Jabatan : Komisaris

Untuk dan atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring menyatakan bahwa:

1. PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memenuhi akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Gondang No. 30
Cepiring Kendal
T : (0294)382234, F : (0294)384384

5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring, serta sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya.

Kendal, 21 Maret 2025

Direksi



Bambang Susanto, S.E., M.M.	**Titrianingsih, S.E.**
Direktur Utama	**Direktur**

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

Dewan Komisaris

Dwi Yono, S.E., M.M.	**Joko Suyanto, S.E., M.M.**
Komisaris Utama	**Komisaris**

KANTOR
Jl. Raya Gondang No.30
Cepiring kendal
T : (0294) 382234,F : (0294)384384

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Posisi Laporan : Tahun 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR Nusamba Cepiring menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
    a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
    b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
    c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
    d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 telah diaudit oleh Akuntan Publik Ridwan Saleh, Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan.
4. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
6. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Cepiring, 05 Mei 2025
PT. BPR Nusamba Cepiring

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

BAMBANG SUSANTO, SE.MM	FITRIANINGSIH, SE
Direktur Utama	Direktur

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

TAHUN 2024



Contact me on WhatsApp
08112722284
bprnusamba.cepiring
bprnusambacepiring.com


bank nusamba
bpr nusamba cepiring
infobank
15th BPR AWARDS
2024
BPR NUSAMBA CEPIRING
MERAIH PENGHARGAAN
PLATINUM AWARD 2024
dari INFOBANK
Contact me on WhatsApp
08112722284
bpr nusamba cepiring
bprnusambacepiring.com
BPR

bank nusamba
bpr nusamba cepiring



TOP 100 BPR
THEFINANCE
2024

BPR NUSAMBA CEPIRING MERAIH PENGHARGAAN

TOP 100 BPR

BERASET RP100 MILIAR KE ATAS

YANG TUMBUH PESAT SELAMA 3 TAHUN

dari **THE FINANCE**

Cek Kurs!

Contact me on WhatsApp
08112722284

bpr nusamba cepiring

bprnusambacepiring.com

BPR Nusamba Cepiring Berizin dan Diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

BPR

LEMBAR PERSETUJUAN

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 14 Maret 2025

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

PENGHARGAAN/ AWARD……. ii

LEMBAR PERSETUJUAN …… iv

DAFTAR ISI……. v

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Informasi Umum…… …….. 1

B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola …….. …….. 2

C. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Bank ……...…… 3

D. Struktur Organisasi Bank ……..... 4

E. Penerapan Tata Kelola Bank…… 6

BAB II HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA……. 8

A. Self Assesment……...…… …….. 8

B. Kesimpulan Assesment……..…….. 9

BAB III TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR …….. 10

A. Ringkasan Hasil Penilaian Self Assesment Atas Penerapan Tata Kelola……....…… ……. 10

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola……..……. 11

C. Kepemilikan Saham Direksi & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

D. Hubungan Keuangan Anggota Direksi i & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR…… 21

E. Hubungan Keluarga Anggota Direksi i & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR…… 21

F. Paket / kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS…… 22

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah…….. 22

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun …….. 23

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris…… 27

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)…… 28
K. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi…… 29
L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan…… 29
M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Politik…… 29

BAB VI PENUTUP …… 31

DAFTAR TABEL

Tabel	Komposisi Kepemilikan Saham	2
Tabel	Jumlah Karyawan …..	6
Tabel	Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	8
Tabel	Ringkasan Hasil Penilaian (Assesment)	10
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Anggota Direksi	11
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
Tabel	Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite	19
Tabel	Struktur Keanggotaan, Keahlian, Independensi Anggota Komite ..	20
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	21
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada BPR	21
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	21
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	21
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Direksi	21
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	22
Tabel	Hubungan Keluarga Anggota Direksi	22
Tabel	Hubungan Keluaga Anggota Dewan Komisaris	22
Tabel	Paket / Kebijakan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris	22
Tabel	Uraian Fasilitas Lain Direksi & Dewan Komisaris	23
Tabel	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	23
Tabel	Rapat Dewan Komisaris	23
Tabel	Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	27
Tabel	Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat Bank	27
Tabel	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	28
Tabel	Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	29

Tabel Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 29

Tabel Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik..... 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring..... 5

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Sejalan dengan mandatory POJK No 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perkonomian Rakyat sesuai pasal 147 dimana BPR Wajib melakukan perubahan nomenklatur " Bank Perkreditan Rakyat" Menjadi " Bank Perekonomian Rakyat.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120109731925 Tanggal 12 Juli 2019.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.
5. Keputusan Mentri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU 0000055.AH.01.02. Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring.

Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan modal Bank, Penambahan modal yang terakhir pada Tahun 2019, Struktur Permodalan Bank terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. Bank telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan & dilengkapi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 141 Tanggal 31 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.Mkn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0308843 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019. Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-416/KR.0313/2019 per tanggal 29 Oktober 2019 telah dicatat dalam Administrasi

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham

NO	NAMA	PROSENTASE KEPEMILIKAN	JUMLAH (Rp.)	LEMBAR SAHAM
1	PT. Sentra Modal Harmoni	89.02%	12.115.000.000	121.150
2	PT. Fajar Mas Murni	10.98%	1.495.000.000	14.950
Jumlah Modal Disetor		**100.00%**	**13.610.000.000**	136.100

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat & Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

   Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.
2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

   Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.
3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

   Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

   a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)

   b) Misi :

      1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
      2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;

3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.

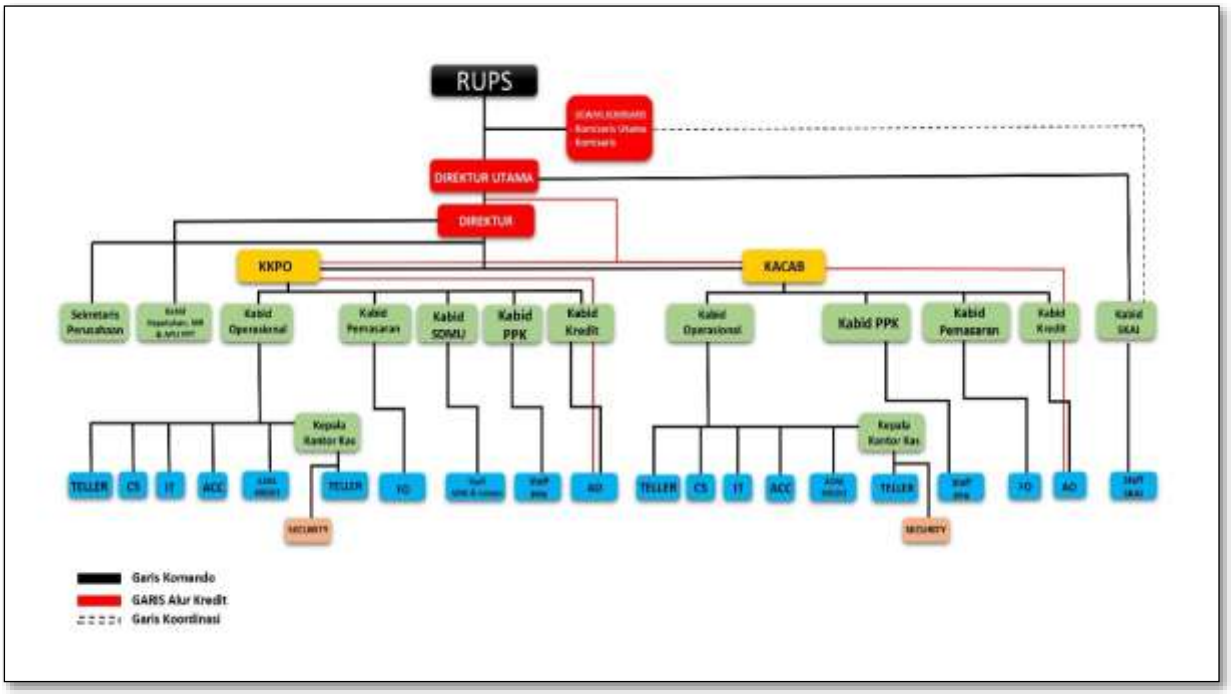
2. Arah Kebijakan Bank

a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perekonomian Rakyat;
d) BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi NO. 12/NSB-CPR/SK-OPS/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & *Job Description* Edisi 2023, sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring



BPR Nusamba Cepiring memiliki 1 KPO dan 5 Cabang, 11 Kantor Kas yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional
    - Kantor Kas Sukorejo
    - Kantor Kas Weleri
    - Kantor Kas Kendal
    - Kantor Kas Pegandon
    - Kantor Kas Cepiring
2. Kantor Cabang Ungaran
    - Kantor Kas Bandungan
    - Kantor Kas Ungaran Barat
3. Kantor Cabang Kaliwungu
4. Kantor Cabang Boja
    - Kantor Kas Limbangan
5. Kantor Cabang Ambarawa
    - Kantor Kas Tuntang
    - Kantor Kas Jambu
6. Kantor Cabang Bergas
    - Kantor Kas Bawen

Sampai bulan Desember 2024, secara keseluruhan jumlah SDM (Termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) Berjumlah 216 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Karyawan

Pendidikan	Pengurus	Karyawan	Total
S2	3	7	10
S1/ DIV	1	155	156
D3	-	26	26
SMA	-	19	19
SMP	-	3	3
Total	**4**	**199**	**216**

E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola dan juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS
7. SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
8. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
9. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.

10. Pedoman internal BPR Nusamba Cepiring lainya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring tahun 2024.

BAB II

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 12 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2024

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor Tata Kelola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai akhir Faktor
NILAI FAKTOR	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2
PREDIKAT KOMPOSIT	PERINGKAT 2												

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan oleh OJK. Hasil penilaian dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG**.** Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

PERINGKAT KOMPOSIT	Predikat Komposit	Definisi
1	Sangat Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
2	Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
3	Cukup Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
4	Kurang Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
5	Tidak Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

B. Kesimpulan Self Assessment

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2024, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Akhir Faktor	**Predikat Komposit**
2	Peringkat 2

Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

BAB III

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	PT. BPR Nusamba Cepiring
Alamat	:	Jl Raya Gondang No 30. Cepiring Kendal
Penjelasan Umum	:	Assesment / Penilaian Sendiri mencakup 13 Faktor penilaian sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR meliputi : Aspek Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Benturan Kepentingan, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ektern, Penerapan Manajemen Risiko & Strategi Anti Fraud, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Integritas Pelaporan dan Sistem TI, Rencana Bisnis, Serta Laporan Transparansi Pelaksnaan Tata Kelola.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assesment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assesment) Tata Kelola	:	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Bambang Susanto, SE.MM
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab antara lain : 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian. 3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya 5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Terkoodinirnya semua aktifitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. 9. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat & efisien. 10. Tercapainya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 11. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 12. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 13. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 14. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 16. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 17. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 18. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposure risiko yang di ambil BPR secara keseluruhan. 19. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. 20. Tugas lainya sesuai ketentuan .

2.	NIK	: -
	Nama	: Fitrianingsih, SE
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab Antara Lain : 1. Bekerjasama dengan Direktur Utama untuk mengoptimalkan Sumber daya yang ada guna mencapai BPR yang sehat dan efisien serta menerapkan kepatuhan dan manajemen risiko secara optimal 2. Terjaminya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 4. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manjemen risiko secara tertulis; 6. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 7. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen 8. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko 9. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen; 10. Bertanggung jawab atas peaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan eksposure risiko yang diambil. 11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 13. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 15. Melaporan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 16. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 17. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 18. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan .	

Tindak lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris antara lain:

1. Telah Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
2. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
3. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran;
4. Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evalauasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal.
5. Direksi telah memantau dan mengevaluasi masing-masing cabang mencapai target sesuai komitmen dan direalisasikan masing-masing SDM dan jaringan setiap bulannya.
6. Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai ketentuan dan menerapkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengembangkan budaya patuh terhadap ketentuan intern maupun ekstern.
7. Direksi telah mencanangkan budaya anti fraud antara lain dengan penempelan fletcer anti fraud di setiap jaringan kantor, pembekalan anti fraud untuk karyawan baru, sosialisasi anti fraud, dan kegiatan kerohanian.
8. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan temuan SKAI
9. Direksi telah mengoptimalkan peran Satuan Kerja Audit Internal dengan fokus pengawasan di lapangan serta tata tertib administratif
10. Direksi telah memantau dan memonitoring terutama tunggakan kredit tidak menjadi Non Performing Loan dan tunggakan bisa turun.
11. Direksi telah melakukan terobosan dalam pemasaran kredit dengan mengembangkan pendekatan ke dalam komunitas.
12. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
13. Direksi telah mengupgrade kondisi pasar dan pesaing terkait produk dengan mengevaluasi produk dan suku bunga produk.
14. Direksi terus berupaya memaksimalkan pencapaian dana baik dari tabungan dan deposito dan melakukan strategi untuk pencapaian sesuai target yang diharapkan.
15. Direksi telah memantau dan memonitoring NPL dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan NPL .
16. Direksi telah melakukan pembentukan PPAP sesuai ketentuan .
17. Direksi telah membuat ketentuan internal sesuai kebutuhan serta mengawasi pelaksanaanya.
18. Direksi telah melakukan persiapan dengan melakukan simulasi pembentukan CKPN atas implementasi SAK EP yang efektif berlaku pada bulan januari 2025.
19. Direksi telah menjalankan manajemen risiko sesuai ketentuan dan terus memantau dan mengevaluasi atas risiko yang timbul di kemudian hari.
20. Direksi telah melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
21. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
22. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara

berkelanjutan;

23. Direksi Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.
24. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : -
	Nama : Dwi Yono, SE.MM
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tanggung Jawab: 1. Memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas : 1. Mengawasi kebijakan Direksi 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Memberikan saran / nasehat kepada Direksi.

	7. Mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Lainya 8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. 15. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan.
2.	NIK : - Nama :Joko Suyanto, SE.MM Jabatan : Komisaris Tanggung Jawab: 1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Bersama-sama Komisaris Utama Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Bersama-sama Komisaris Utama Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan

	Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bersama-sama Komisaris Utama Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas : 1. Bersama-sama Komisaris Utama Mengawasi kebijakan Direksi 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan saran / nasehat kepada Direksi. 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan Rapat Dewan Komisaris & Rapat Lainya 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Bersama-sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. 15. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : a.Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

	18. Bersama-sama Komisaris Utama mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 19. Tugas lainya sesesui ketentuan

Rekomendasi kepada Direksi antara lain :

1. Kredit dan dana pihak ketiga telah tumbuh dengan baik, untuk rasio-rasio keuangan belum sesuai dengan target yang diharapkan, untuk itu strategi yang ada agar terus ditingkatkan serta tetap melakukan evaluasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
2. Komitmen untuk mencapai target dan selalu tumbuh agar dapat direalisasikan oleh SDM dan jaringan yang ada setiap bulan.
3. Tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan lainnya juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan. Canangkan budaya anti fraud.
4. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Auditor Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dan sampling serta tertib administratif berbasis risiko.
5. Pejabat harus menjadi tauladan dalam segala hal dan menjadi supervisor serta motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.
6. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Auditor Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dan sampling serta tertib administrative
7. Jaringan agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, melihat peluang pasar dilingkungan sekitar kantor cabang yang masih sangat potensial dan terbuka.
8. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
9. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.
10. Terus lakukan evaluasi terhadap Strategi dan lakukan terobosan dalam pemasaran kredit namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
11. Terus lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawari kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur.
12. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
13. Komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
14. Prioritas peningkatan kredit dengan menambah nasabah baru bukan nasabah lama dengan memperbesar kredit mikro.
15. Peningkatan jumlah nasabah kredit baru agar menjadi perhatian, lakukan evaluasi jika terjadi penurunan nasabah dan lakukan langkah-langkah antisipatif terhadap penurunan jumlah nasabah.

16. Strategi pemasaran dana yang ada agar selalu di evaluasi dan terus ditingkatkan.
17. Ketergantungan terhadap Nasabah besar agar dikurangi dengan share ke nasabah perorangan.
18. Jaringan yang ada tetap dioptimalkan dan terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitment agar hasilnya tetap optimal.
19. Monitoring kredit terus dioptimalkan, karena kredit lancar tunggakan 3 berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dini terhadap tunggakan kredit.
20. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengan memperhatikan prinsip prudential banking.
21. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah
22. Optimalkan pendapatan bank dengan cara lebih mengoptimalkan dalam peningkatan volume kredit dan Fee Base Income
23. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara sehat.
24. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar segera di tindak lanjuti.
25. Lakukan simulasi terhadap ketentuan terbaru mengenai KAP & PPAP dan juga lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 4 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%.
26. Lakukan simulasi terkait penerapan SAK EP Terutama CKPN
27. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru.
28. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
29. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
30. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
31. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
32. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
33. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
34. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada pedoman yang ada.
35. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
36. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 3 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi & Nominasi
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainya**)
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

Jumlah modal inti BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2024 adalah Rp. 27.978.236.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) "Sebelum *Audit KAP*",sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas Sehingga dalam pelaksanaanya ***BPR Nusamba Cepiring belum membentuk Komite Audit Komite Pemantau Risiko & Komite Remunerasi & Nominasi.***

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, Independensi Anggota Komite

No	NIK*)	Nama	Keahlian	Komite ***)					Pihak Independen (Ya/ Tidak)
				Audit	*Pemantau Risiko*	*Remunerasi & Nominasi*	*Manajemen Risiko*	*lainya*	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

D. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Bambang Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Fitrianingsih	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. **Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR**

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Dwi Yono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Joko Suyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	-	Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

G. PAKET /KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/ kebijakan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris

NO	JENIS REMUNERASI (DALAM 1 TAHUN)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1	Gaji*)	2	917.200.000	2	402.800.000
2	Tunjangan	2	188.925.000	2	132.000
3	Tantiem	2	105.000.000	2	245.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
5	Remunerasi Lainya**)	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada

	Total Remunerasi		1.211.125.000		779.800.000
NO	**Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)**	**Jumlah Orang**	**Jumlah Keseluruhan (Rp.)**	**Jumlah Orang**	**Jumlah Keseluruhan (Rp.)**
1	Perumahan	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
2	Transportasi	2	164.400.000	1	87.600.000
3	Asuransi Kesehatan	2	11.250.000	1	5.760.000
4	Fasilitas Lainya ***)	2	180.875.000	2	60.700.000
	Total		356.525.000		154.060.000

Keterangan :
RUPS yang dilaksanakan adalah pelaksanaan RUPS di tahun 2023. Sampai dengan Bulan Maret 2025 belum diselenggarakanya RUPS tahunan atas Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2024. RUPS Tahunan akan di selenggarakan maksimal sesuai ketentuan, maksimal 6 bulan setelah tahun berakhir.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

1. Rasio gaji tertinggi da terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan**)
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	25 Maret 2024	2	- Likuiditas Bank menghadapi Idul Fitri - Antisipasi keamaan kantor pada saat cuti lebaran harus diperhatikan,

			mengingat BPR merupakan bisnis yang berisiko tinggi. - Penyampaian materi RUPST untuk disiapkan dan dibuat dengan data-data riil. - Mitigasi dan kelembagaan risiko bank sudah berjalan dengan baik. Keadaan ini jangan sampai membuat terlena. - Pengurus dibentuk sebagai peran *by design* untuk menyiapkan dan menyusun strategi-strategi tepat sasaran. - Kolaborasi dengan pihak ketiga sudah *in line* dengan perkembangan bisnis masa kini. Kolaborasi mendorong bisnis akan tumbuh. - Strategi yang sudah dijalankan sudah in line dengan memposisikan potensi karyawan/SDM sesuai bidangnya - Menghadapi Lebaran, pantauan likuiditas lebih diperketat, mengingat banyaknya rencana pengambilan dana baik Tabungan maupun deposito yang akan jatuh tempo. - Petugas *funding officer* harus lebih giat menjalankan tugasnya setelah momentum lebaran. - Untuk meningkatkan kompetisi yang sehat serta memotivasi dalam berkarya, antar kantor cabang maupun Kas dinilai setiap bulannya - Terus mendorong SDM untuk tetap produktif.
2.	12 Juni 2024	2	- Isu BPR ditutup oleh OJK, Indicator yang kedua dilihat dari tata kelola resiko .dengan adanya pencabutan ijin usaha Bank berpengaruh dengan Tingkat kepercayaan Masyarakat. - Industri sangat tidak baik- baik saja karna secara kuatiti pertumbuhan biasa saja, - Pasca restrrukturisdaksi kredit kita belum bisa recovery dengan baik, dilihat - Pemahanan SAKEP jika sudah sudah memahami maka bisa memitigasi , - Simulasi CKPN & Persiapan Implementasi SAK EP,

			- LAR
3.	09 September 2024	2	- Pengelolaan asset yang kompetitif. - Strategi bisnis bank mengedepankan prinsip prudential banking. - Terobosan strategi-strategi yang pro-efisiensi. - Pertumbuhan dan efisiensi - Frekuensi, pemahaman, dan pengetahuan harus diselaraskan untuk mencapai strategi bisnis yang direncanakan. - Penangaan NPL harus di-maping dan susun action plan terhadap penyelesaian kredit bermasalah. - Pengptimalkan micro funding karena masyarakat sudah memiliki kepercayaan terhadap BPR. - Pertumbuhan bisa dilakukan dengan mencari market yang tidak sensitive. - Mitigasi risiko - Peran Leader wajib memberikan kemajuan bagi bisnis bank. - Strategi-strategi bisnis yang dirasa tidak membuahkan hasil yang bagus untuk dievaluasi karena terdapat kelemehan structural. - Peningkatan Kredit & Dana - Kinerja tim Legal untuk ditingkatkan untuk mengatasi nasabah kredit bermasalah. - Peningkatan layanan berbasis digital sangat membantu dan mempermudah pekerjaan. - SKAI dalam bidangnya untuk melakukan pengawasan juga dipermudah. Tim Kepatuhan untuk selalu mengawal pengkinian data nasabah pengguna layanan digital agar segala transaksi yang dilakukan nasabah langsung ternotifikasi. - Simulasi atau uji coba penerapan SAKEP/CKPN sudah dilakukan oleh Nusamba Cepiring. Tim terkait untuk terus melakukan simulasi dan menunjukkan dampak yang terjadi terhadap penerapannya.

4.	06 Desember 2024	2	- Professional dalam bekerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing SDM - Momen penyusunan RBB bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja. - perubahan yang lebih baik. - Pejabat eksekutif harus memahami sebuah pekerjaan sebagai proses holistic. - Secara teknis actual pencapaian bulan oktober menjadi pijakan untuk melangkah satu tahun ke depan. - Tantangan industry perbankan tidaklah mudah. Kolerasinya terhadap bisnis bank adalah penyesuaian atau pengambilan kebijakan strategi yang diputuskan oleh pemerintahan dalam memberikan kemudahan bagi bisnis bank. Daya konsumsi masyarakat Indonesia menyerap banyak variable. - Regulasi ketentuan internal seperti CKPN berpengaruh terhadap perform bisnis bank. - Persiapkan dengan matang pelaporan RBB tahun anggaran 2025. - Himbauan dari dewan komisioner OJK untuk menambahkan UMKM dalam kerangka RBB tahun 2025. - Pembuatan laporan pra RBB untuk dilaksanakan dengan serius dengan mengedepankan sisi merger. - Hasil audit OJK dan komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama untuk dipenuhi sehingga semua clear dan pastikan jangan sampai ditemukan adanya temuan berulang. - POJK 15 tentang integritas pelaporan keuangan bank harus clear dan tidak ada rekayasa, jalankan sesuai dengan arahan yang ada.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Teleconfrensi	
1.	-	Dwi Yono	4	-	100%
2.	-	Joko Suayanto	-	4	100%

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh Pejabat Bank untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja secara umum, Selama periode 2024 rapat yang dihadiri Dewan Komisaris :

Tabel Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat bank

No	Rapat	Pelaksanaan	Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris & Direksi	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
2.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat Bank	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Seluruh Pejabat Bank	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
3.	Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid SKAI	Pembahasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi SKAI, Audit Eksternal, dan Tindak

			- Staff SKAI	lanjut hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
4.	Rapat Koordinasi Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid Kepatuhan,MR & APUPPT - Staff Kepatuhan,MR & APUPPT	Pembahasan pelaksanaan ,pemantauan dan pengawasan penerapan kepatuhan, Manajemen risiko dan APU-PPT

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal *(dalam 1 tahun)*	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total *fraud*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah diselesaikan		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Belum Diupayakan Penyelesaianya	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	*Nihil*	*Nihil*
Dalam proses penyelesaian	*Nihil*	*Nihil*
Total	*Nihil*	*Nihil*

Keterangan :

Dalam periode 2024 permasalahan hukum yang terjadi semuanya merupakan perkara gugatan sederhana dari pihak Bank kepada Debitur yang dilaksanakan di Pengadilan Negri Kendal dan Pengadilan Negri Kabupaten Semarang akibat ingkar janji (wanprestasi).

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	PT Sentra Modal Harmoni	Pemegang Saham Pengendali	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Sewa Mobil	583.200	Sewa 9 Kendaraan Untuk Operasional (Telah dilakukan cost & benefit dan data pembanding)
2	PT Sentra Modal Harmoni	Pemegang Saham Pengendali	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Sewa Gedung	59.400	Sewa Gedung Untuk Kantor Pusat

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP *)	Jumlah (Rp)
1.	14 Mei 2024	Sosial	bansos hari buruh (disperinaker)	(disperinaker) Kab Kendal		Rp 1.000.000,-

2.	01 Agustus 2024	Sosial	Sumbangan Kegiatan MUNAS PERTUNI	PERTUNI KENDAL		Rp 3.900.000,-
3.	05 Agustus 2024	Sosial	bantuan yatama (putra-putri banser)	Banser NU Kab Kendal		Rp 5.000.000,-
4.	Setiap Awal Bulan	Sosial	Beasiswa & Santunan Anak Yatim Santri PA NU Tejorejo Pegandon	PA NU Desa Tegorejo Pegandon		Rp 42.000.000,-
5.	27 September 2024	Sosial	Sponsorship MUSKERCAB II PCNU	PCNU Kab Kendal		Rp 10.000.000,-
6.	15 Oktober 2024	Sosial	sponsorship Pelatihan Jurnalistik NU Kendal	PCNU Kab Kendal		Rp5.230.000,-
7.	18 Oktober 2024	Sosial	Promosi dan Branding Mobil Siaga Bencana NU peduli	PCNU Kab Kendal		Rp 65.000.000,-
8.	25 Oktober 2024	Sosial	Peringatan HSN MWC NU Cepiring	MWC NU Kec Cepiring		Rp 3.450.000,-
9	18 Desember 2024	Sosial	Sponsorship PPDI (Hari Disabilitas Internasional) 15 Desember 2024	PERTUNI Kendal		Rp 7.070.000,-
Total						**Rp 142.650.000,-**

Keterangan :

Selama tahun 2024 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainya.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring tahun 2024 untuk periode penilaian 31 Desember 2024, disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR , yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri *(Self-Assesment)* penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2024.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.

Kendal , 14 Maret 2025

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama